



Rabu, 20 Januari 2021

1. Nasabah Ritel Mulai Ikut Restrukturisasi Jiwasraya
Kontan, hal. 10 / 20-01-2021 hal. 10

■ RESTRUKTURISASI JIWASRAYA

Nasabah Ritel Mulai Ikut Restrukturisasi Jiwasraya

JAKARTA. Perlahan-lahan restrukturisasi polis Jiwasraya bisa berjalan. Hingga 18 Januari 2020, sebanyak 102.856 pemegang polis menyetujui program restrukturisasi tersebut.

Koordinator Tim Satgas Restrukturisasi Polis Jiwasraya bidang Komunikasi dan Hukum, R. Mahelan Prabantakso mengatakan, sebanyak 101.294 peserta berasal dari 884 perusahaan. Sedangkan 1.156 peserta adalah pemegang polis ritel, dan 406 peserta pemegang polis *bancassurance*.

"Terdapat kenaikan jumlah peserta yang sangat signifikan dalam dua pekan pasca kami mengumumkan tahapan sosialisasi di akhir Desember 2020 dan mulai mengirimkan surat penawaran program restrukturisasi pada awal Ja-

nuari 2021," kata R. Mahelan dalam keterangan resmi, Selasa (19/1).

Ia menyebutkan, kenaikan jumlah peserta yang mengikuti program restrukturisasi tak lepas dari peran pemerintah, regulator, internal hingga agen Jiwasraya. Mereka dinilai telah menyiapkan segala perangkat teknis serta non teknis mengenai pelaksanaan program restrukturisasi tersebut.

Demi mempercepat restrukturisasi, Jiwasraya telah menyiapkan 1.094 agen dan ratusan pegawai yang tersebar di kantor pusat dan wilayah untuk melakukan sosialisasi program tersebut. Anggota Tim Percepatan Restrukturisasi Polis Jiwasraya, Fabiola Sondakh mengatakan optimis program ini bisa diikuti seluruh nasabah.

Dalam rangka menyelamatkan seluruh polis Jiwasraya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menyiapkan dana mencapai Rp 22 triliun. Dana yang berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) itu untuk mendirikan perusahaan asuransi baru bernama IFG Life.

Selain itu, terdapat tambahan modal senilai Rp 4,7 triliun yang berasal setoran dividen IFG yang nantinya akan diberikan kepada IFG Life. Rencananya, dana tersebut digunakan untuk membayar manfaat polis yang direstrukturisasi sekaligus modal IFG Life dalam menasar bisnis di sektor asuransi kesehatan, jiwa dan pengelolaan dana pensiun.

Ferrika Sari



KONTAN/Baihaki

Demi mempercepat restrukturisasi, Jiwasraya telah menyiapkan 1.094 agen.

2. Nasabah minta OJK segera tindak Asuransi Jiwa Kresna [Antaranews.com](https://www.antaranews.com/19-01-2021) / 19-01-2021

Nasabah minta OJK segera tindak Asuransi Jiwa Kresna

© Selasa, 19 Januari 2021 12:39 WIB



ilustrasi (foto Antara)

Jakarta (ANTARA) - Nasabah meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menindak Asuransi Jiwa Kresna (AJK) terkait putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU terhadap perusahaan asuransi jiwa tersebut.

"Nasabah-nasabah sangat mengharapkan bahwa OJK dapat segera langsung bertindak, karena sampai saat ini OJK masih belum mengambil tindakan nyata atas PKPU PT AJK walaupun sudah berulang kali nasabah-nasabah menyurati OJK dan mengirim pesan whatsapp secara pribadi kepada pejabat-pejabat OJK terkait," kata salah seorang nasabah Nurlaila dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Nurlaila menuturkan, kenyataan yang terjadi sekarang adalah sidang proses PKPU oleh pengadilan terus saja berlanjut dimana pada 15 Januari 2020 AJK melalui tim pengurus PKPU mengajukan proposal perdamaian. Menurutinya, proposal tersebut mengejutkan dan meresahkan nasabah.

Ia menuturkan, proposal yang diajukan AJK dalam PKPU menuliskan masa tenggang untuk mulai bayar selama 12 bulan dari tanggal perjanjian perdamaian dan dalam tabel ditulis dimulai Juli 2022.

"Sedangkan dalam skema pembayaran tanggal 7 September 2020 yang diajukan AJK sebelum PKPU dan sudah disetujui oleh sebagian besar nasabah-nasabah pemegang 8.054 polis pembayaran dimulai sejak September 2020 lalu dimulai dengan 50 juta kepada nasabah-nasabah yang sudah menandatangani Perjanjian Kesepakatan Bersama atau PKB," ujar Nurlaila.

Nurlaila mengatakan, AJK sendiri sudah mulai membayar sebagian kewajibannya kepada 5.672 polis. Akan tetapi, sejak keluarnya putusan sela PKPU pada 10 Desember 2020, AJK menghentikan semua pembayarannya dengan alasan PKPU tersebut.

"Begitu juga rencana pembayaran untuk pensiunan, manula dan orang-orang sakit yang sangat membutuhkan juga jadi terhenti," katanya.

OJK sendiri sudah meminta AJK untuk mengambil tindakan hukum dan nasabah-nasabah juga sudah mendapatkan dan mengabarkan bahwa ada dasar hukum untuk AJK mengajukan pencabutan PKPU tersebut. Namun, lanjut Nurlaila, ternyata AJK sama sekali tidak melakukan tindakan hukum apapun.

"Nasabah sekali lagi meminta agar OJK segera bertindak nyata menjalankan tupoksinya karena sudah diberi kewenangan yang besar oleh negara, terutama dalam hal perlindungan nasabah atau masyarakat," ujar Nurlaila.

Pewarta: Citro Atmoko

Editor: Budi Suyanto

COPYRIGHT © ANTARA 2021

3. Proses PKPU Terus Berlanjut, Nasabah Minta OJK Tindak Tegas Asuransi Jiwa Kresna Hukumonline.com / 19-01-2021

BERITA

Tanggapan

Selasa, 19 January 2021

Proses PKPU Terus Berlanjut, Nasabah Minta OJK Tindak Tegas Asuransi Jiwa Kresna

Sampai saat ini OJK masih belum mengambil tindakan nyata atas PKPU PT AJK walaupun sudah berulang kali nasabah-nasabah menyurati OJK dan mengirim pesan whatsapp secara pribadi kepada pejabat-pejabat OJK terkait.

M. Agus Yozani



Nasabah meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menindak Asuransi Jiwa Kresna (AJK) terkait putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan asuransi jiwa tersebut.

"Nasabah-nasabah sangat mengharapkan bahwa OJK dapat segera langsung bertindak, karena sampai saat ini OJK masih belum mengambil tindakan nyata atas PKPU PT AJK walaupun sudah berulang kali nasabah-nasabah menyurati OJK dan mengirim pesan whatsapp secara pribadi kepada pejabat-pejabat OJK terkait," kata salah seorang nasabah Nurlaila dalam keterangan yang dikutip dari Antara di Jakarta, Selasa (19/1).

Nurlaila menuturkan, kenyataan yang terjadi sekarang adalah sidang proses PKPU oleh pengadilan terus saja berlanjut, di mana pada 15 Januari 2020 AJK melalui tim pengurus PKPU mengajukan proposal perdamaian. Menurutnya, proposal tersebut mengejutkan dan meresahkan nasabah.

Ia menuturkan, proposal yang diajukan AJK dalam PKPU menuliskan masa tenggang untuk mulai bayar selama 12 bulan dari tanggal perjanjian perdamaian dan dalam tabel ditulis dimulai Juli 2022.

"Sedangkan dalam skema pembayaran tanggal 7 September 2020 yang diajukan AJK sebelum PKPU dan sudah disetujui oleh sebagian besar nasabah-nasabah pemegang 8.054 polis pembayaran dimulai sejak September 2020 lalu dimulai dengan 50 juta kepada nasabah-nasabah yang sudah menandatangani Perjanjian Kesepakatan Bersama atau PKB," ujar Nurlaila.

Nurlaila mengatakan, AJK sendiri sudah mulai membayar sebagian kewajibannya kepada 5.672 polis. Akan tetapi, sejak keluarnya putusan sela PKPU pada 10 Desember 2020, AJK menghentikan semua pembayarannya dengan alasan PKPU tersebut.

"Begitu juga rencana pembayaran untuk pensiun, manula dan orang-orang sakit yang sangat membutuhkan juga jadi terhenti," katanya. (Baca: [Jiwasraya Dimohonkan PKPU, Nasabah Ini Pilih Restrukturisasi](#))

OJK sendiri, kata Nurlaila, sudah meminta AJK untuk mengambil tindakan hukum dan nasabah-nasabah juga sudah mendapatkan dan mengabarkan bahwa ada dasar hukum untuk AJK mengajukan pencabutan PKPU tersebut. Namun, lanjut Nurlaila, ternyata AJK sama sekali tidak melakukan tindakan hukum apapun.

"Nasabah sekali lagi meminta agar OJK segera bertindak nyata menjalankan tupoksinya karena sudah diberi kewenangan yang besar oleh negara, terutama dalam hal perlindungan nasabah atau masyarakat," ujar Nurlaila.

Sebelumnya, OJK menyatakan tidak pernah menyetujui permohonan dari pihak manapun untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna atau Kresna Life. "OJK menghormati proses hukum dan keputusan pengadilan mengenai putusan sela PKPU PT Asuransi Jiwa Kresna. Namun, OJK menyatakan tidak pernah menyetujui permohonan dari pihak manapun untuk mengajukan terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna. OJK juga tidak pernah mengajukan permohonan PKPU atas PT Asuransi Jiwa Kresna kepada pengadilan," kata Deputy Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik Anto Prabowo dalam keterangan di Jakarta, Rabu (23/12) lalu.

Seperti diketahui, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 10 Desember 2020 menetapkan bahwa PT Asuransi Jiwa Kresna berada dalam status PKPU sementara untuk selama 45 hari terhitung sejak tanggal putusan. Putusan sela atas PKPU tersebut diajukan oleh pemohon atas nama Lukman Wibowo yang diwakili oleh Penasehat Hukum Benny Wullur S.H & Associates terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna (AJK).

Sesuai pasal 50 UU Peralusansian No. 40/2014 dan penjelasannya menyebutkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah berdasarkan Undang-Undang tersebut hanya dapat diajukan oleh OJK.

Dalam catatan OJK, terdapat terdapat dua permohonan PKPU terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna yang disampaikan kepada OJK dan keduanya telah ditolak oleh OJK. Pertama, permohonan tersebut adalah permohonan dari JG Law Firm mewakili pemohon atas nama Lie Hertan dan Rudy Kartadinata melalui surat tanggal 6 Agustus 2020 hal Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT Asuransi Jiwa Kresna.

Kedua, Permohonan dari Kantor Hukum Benny Wullur SH & Associates mewakili 15 (lima belas) pemegang polis PT Asuransi Jiwa Kresna melalui surat tanggal 11 Agustus 2020 hal Permohonan izin PKPU PT Asuransi Jiwa Kresna.

Mengenai persoalan tersebut, OJK telah mengundang Direksi PT Asuransi Jiwa Kresna untuk meminta penjelasan terkait tindak lanjut upaya hukum PKPU yang akan dilakukan oleh perusahaan asuransi itu.

"Dalam kesempatan tersebut, direksi PT Asuransi Jiwa Kresna menyatakan sikap yang pada intinya berkeberatan dengan putusan dimaksud karena manajemen Kresna telah melakukan perundingan penyelesaian kewajiban kepada pemegang polis," ujar Anto.

Sampai 18 Desember 2020, PT Asuransi Jiwa Kresna telah menerima persetujuan Perjanjian Kesepakatan Bersama atas 8.054 polis atau 77,61 persen dari jumlah polis) atas kewajiban senilai Rp3,85 triliun atau 5,76 persen dari total kewajiban).

PT Asuransi Jiwa Kresna juga telah mulai melakukan pembayaran kewajiban kepada pemegang polis senilai Rp283,60 miliar untuk 5.672 polis.

"Menindaklanjuti pertemuan dengan manajemen Kresna, OJK menyampaikan surat yang meminta PT Asuransi Jiwa Kresna untuk melakukan upaya-upaya hukum terhadap putusan pengadilan dimaksud termasuk upaya hukum luar biasa, sesuai ketentuan perundang-undangan," kata Anto.

Mempertimbangkan kepentingan pemegang polis PT Asuransi Jiwa Kresna yang lebih luas serta dampak PKPU terhadap reputasi industri perasuransian, terkait dengan putusan sebagaimana dimaksud pada di atas, OJK sesuai dengan kewenangannya akan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka penyehatan keuangan PT Asuransi Jiwa Kresna, OJK juga telah meminta pemegang saham untuk mendetalkan rencana penyehatan modal dalam rangka menyelesaikan kewajiban PT Asuransi Jiwa Kresna.

"OJK terus mengawasi dan mengawal proses penyehatan keuangan PT Asuransi Jiwa Kresna dan penyelesaian klaim pemegang polis PT AJK untuk terus memberikan perlindungan terhadap pemegang polis," ujar Anto.

Saat ini, OJK juga tengah mengenakan sanksi administratif kepada PT Asuransi Jiwa Kresna yaitu sanksi pembatasan kegiatan usaha untuk seluruh kegiatan usaha melalui surat nomor S499/NB.21/2020 tanggal 7 Desember 2020 hal Pembatasan Kegiatan Usaha. Sanksi tersebut dikenakan dengan jangka waktu tiga bulan.

4. Tak Puas Dana Penggantian, Nasabah Jiwasraya Protes [Cnbcindonesia.com](https://www.cnbcindonesia.com) / 19-01-2021

CNBC Indonesia > Market > Berita Market

Tak Puas Dana Penggantian, Nasabah Jiwasraya Protes

MARKET - Houtmand P Saragih, CNBC Indonesia | 19 January 2021 12:50

SHARE |  



Foto: Nasabah Jiwasraya yang tergabung dalam Forum Korban Jiwasraya melakukan aksi damai di Kantor Pusat Jiwasraya, Jakarta, Jumat, (11/9). (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menolak penawaran restrukturisasi polis yang ditawarkan perseroan melalui 7 bank penjual.

Nasabah yang tergabung dalam Forum Korban BUMN Jiwasraya sampai membuat pernyataan sikap dalam satu halaman surat kabar nasional.

Dalam pernyataan sikap disebutkan, nasabah menolak skema restrukturisasi yang ditawarkan Jiwasraya karena dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan nasabah.

Penawaran yang ditolak dalam bentuk cicilan 15 tahun tanpa bunga dan cicilan 5 tahun tanpa bunga dengan pemotongan pokok 29%-31%.

"Kami menggugat pihak Asuransi Jiwasraya untuk segera merealisasikan pembayaran hak-hak yang telah jatuh tempo sebagaimana telah dinyatakan dan tertuang dalam kontrak polis yang sebelumnya telah disetujui bersama nasabah Saving Plan," tulis pernyataan tersebut, yang dipublikasikan Selasa (19/1/2021).

Ada 8 poin utama isi pernyataan tersebut. Nasabah juga menolak pemindahan pengelolaan polis ke Asuransi Jiwa IFG Life yang merupakan anak usaha IFG (Indonesia Financial Group, nama baru BUMN PT Bahana).

Nasabah juga menggugat pemegang saham Jiwasraya melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Direktur Utama Jiwasraya Hexana Tri Sasongko merespons penolakan nasabah tersebut. Skema yang ditawarkan manajemen Jiwasraya merupakan solusi yang terbaik yang bisa diberikan.

"Solusi yg kami sampaikan adalah yg terbaik yg saat ini bisa kita peroleh. Pemerintah sdh hadir sebagai pemegang saham sesuai dg kemampuan di tengah kondisi saat ini. Ini jauh lebih baik dari opsi solusi likuidasi," kata Hexana kepada CNBC Indonesia.

"Saat ini kami fokus sosialisasi dan sekaligus restrukturisasi nasabah lain. Sudah banyak yang *close*. Kami mohon maaf kalau kalau tidak memuaskan."

5. Jumlah Aset Bumiputera di Laporan Keuangan dan Dokumen MK Berbeda. Kok Bisa? [Bisnis.com](https://bisnis.com) / 19-01-2021

FINANSIAL

HOME

PERBANKAN

ASURANSI

MULTIFINANCE

PERSONAL FINANCE

MONETER

SYARIAH

FINTech

Home • Finansial • Asuransi

Jumlah Aset Bumiputera di Laporan Keuangan dan Dokumen MK Berbeda. Kok Bisa?

Angka jumlah aset yang tercantum dalam dokumen putusan MK tercatat berbeda dengan yang ada dalam laporan keuangan 2019 *audited* Bumiputera. Terdapat selisih nilai sekitar Rp200 miliar dari kedua dokumen itu.

 **Wibi Pangestu Pratama** - [Bisnis.com](#)
19 Januari 2021 | 15:49 WIB



Pemegang polis Asuransi Jiwa Bersama atau AJB Bumiputera 1912 melakukan aksi damai di Wisma Bumiputera, Jakarta pada Rabu (21/10/2020). - Dok. Istimedia

A⁺

A⁻

Share







Bisnis.com, JAKARTA — Dokumen putusan Mahkamah Konstitusi mencantumkan nilai aset dari Asuransi Jiwa Bersama atau AJB Bumiputera 1912, tetapi angkanya berbeda jika dibandingkan dengan yang tercantum di laporan keuangan perseroan.

Kondisi keuangan terbaru dari Bumiputera belum diketahui oleh publik lantaran tidak dipublikasikannya laporan kuartalan di situs resmi perseroan. Berdasarkan pantauan *Bisnis*, Bumiputera hanya menampilkan laporan keuangan 2019 di situsnya.

Catatan keuangan Bumiputera pun muncul dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 32/PUU-XVIII/2020 terkait uji materiil Undang-Undang 40/2014 tentang Perasuransian oleh Badan Perwakilan Anggota (BPA). Putusan itu mengabulkan sejumlah gugatan BPA, khususnya terkait perintah pembentukan Undang-Undang Asuransi Usaha Bersama.

Dalam dokumen yang diterbitkan pada pekan lalu itu, tercantum rentetan data aset Bumiputera dari tahun ke tahun. Terbaru, nilai aset *unaudited* Bumiputera per Juni 2020 tercatat hanya sebesar Rp10,1 triliun, padahal perseroan menghadapi utang klaim jatuh tempo yang berkisar Rp12 triliun.

Nilai aset itu menurun sekitar Rp100 miliar jika dibandingkan dengan posisi akhir 2019 senilai Rp10,2 triliun. Penurunan nilai aset itu kontras dibandingkan dengan lonjakan klaim, yang pada akhir 2019 masih berkisar Rp5,3 triliun.

Angka yang tercantum dalam dokumen putusan MK itu tercatat berbeda dengan yang ada dalam laporan keuangan 2019 *audited* Bumiputera. Terdapat selisih nilai sekitar Rp200 miliar dari kedua dokumen itu.

"Jumlah aset per 31 Desember 2019 Rp9,97 triliun," tertulis dalam laporan keuangan Bumiputera yang dikutip *Bisnis* pada Selasa (19/1/2021).

Meskipun terdapat perbedaan angka, tren penurunan nilai aset sama-sama tergambarkan dalam kedua dokumen. Dalam laporan keuangan *audited*, nilai aset pada 2019 itu turun 4,6 persen (*year-on-year*) dibandingkan dengan aset 2018 senilai Rp10,45 triliun.

Dokumen MK pun mencantumkan bahwa nilai aset pada 2019 senilai Rp10,2 triliun turun dari posisi 2018 sebesar Rp10,5 triliun. Penurunan itu terus terjadi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yakni 2017 senilai Rp11,9 triliun, 2016 sebesar Rp13,4 triliun, dan 2015 senilai Rp15 triliun.

Posisi aset pada 2015 tercatat sebagai yang tertinggi dalam sewindu terakhir. Nilainya tumbuh dibandingkan dengan 2014 yang sebesar Rp14,2 triliun dan 2013 senilai Rp10,9 triliun.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

asuransi

ajb bumiputera 1912

Editor : Ropesta Sitorus

6. **102 Ribu Pemegang Polis Ikut Skema Restrukturisasi Jiwasraya**
[cnbcindonesia.com](https://www.cnbcindonesia.com) / 19-01-2021

102 Ribu Pemegang Polis Ikut Skema Restrukturisasi Jiwasraya

MARKET - Donald Banjarnahor, CNBC Indonesia | 19 January 2021 15:59

SHARE |  



Foto: Arie Pratama

Jakarta, CNBC Indonesia - Tim Percepatan Restrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menyatakan, sampai dengan 18 Januari 2021,  sebanyak 102.856 peserta mengikuti skema restrukturisasi polis.

Jumlah tersebut terdiri dari 101.294 peserta yang berasal dari 884 perusahaan untuk pemegang polis kategori korporasi, 1.156 peserta dari pemegang polis kategori ritel, dan 406 peserta dari pemegang polis kategori bancassurance.

Koordinator Tim Satgas Restrukturisasi Polis Jiwasraya bidang Komunikasi dan Hukum, R. Mahelan Prabantarkso menyebut, ada kenaikan jumlah peserta cukup signifikan dalam 2 pekan setelah perseroan mengumumkan tahapan sosialisasi di akhir Desember 2020 dan mulai mengirimkan surat penawaran program restrukturisasi pada awal Januari 2021.

"Adanya kenaikan jumlah peserta yang mengikuti program restrukturisasi tak lepas dari peran sejumlah pihak mulai dari pemerintah, regulator, otoritas hingga internal dan agen Jiwasraya yang telah menyiapkan segala perangkat teknis serta non teknis mengenai pelaksanaan program restrukturisasi polis Jiwasraya," katanya.

Ia pun mengapresiasi respons seluruh pemegang polis yang mengikuti program penyelamatan polis, hingga para nasabah yang saat ini dalam antrian sosialisasi dan penawaran program restrukturisasi polis.

"Bagaimana pun juga, para pemegang polislah yang menjadi salah satu faktor utama dari upaya penyelamatan polis ini," kata dia.

Pada kesempatan yang sama, anggota Tim Percepatan Restrukturisasi Polis Jiwasraya, Fabiola Sondakh mengatakan demi mempercepat dan menyukseskan pelaksanaan program restrukturisasi polis Jiwasraya, pihaknya telah menyiapkan sedikitnya 1.094 agen dan ratusan pegawai yang tersebar di kantor pusat dan wilayah untuk melakukan sosialisasi program restrukturisasi. Fabiola pun optimistis program restrukturisasi ini akan diikuti oleh seluruh pemegang polis.

"Semoga kerja keras ini dapat dipahami sebagai tanggungjawab dan komitmen kami sebagai manajemen baru dalam rangka menyelamatkan seluruh polis Jiwasraya. Upaya ini adalah upaya terbaik yang saat ini dapat kami berikan kepada seluruh pemegang polis," kata Fabiola yang juga Direktur Pemasaran Ritel Jiwasraya.

Seperti diketahui, dalam rangka menyelamatkan seluruh polis Jiwasraya pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menyiapkan dana mencapai Rp 22 triliun yang berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk mendirikan perusahaan asuransi baru bernama IFG Life. Tak hanya itu, terdapat tambahan modal senilai Rp 4,7 triliun yang berasal setoran dividen IFG yang nantinya akan diberikan kepada IFG Life.

Selain melanjutkan manfaat atas polis eks Jiwasraya yang telah direstrukturisasi, dana tersebut juga akan digunakan oleh IFG Life sebagai modal untuk menyasar bisnis di sektor asuransi kesehatan, jiwa dan pengelolaan dana pensiun. IFG Life sendiri diyakini akan menjadi perusahaan asuransi terbesar lantaran memiliki target pemegang polis yang berasal dari ekosistem BUMN dan masyarakat umum.

7. Restrukturisasi Jiwasraya Jalan Terbaik, Ketimbang Likuidasi! cnbcindonesia.com / 19-01-2021

CNBC Indonesia > Market > Berita Market

Restrukturisasi Jiwasraya Jalan Terbaik, Ketimbang Likuidasi!

MARKET - Syahrizal Sidik, CNBC Indonesia | 19 January 2021 16:41

SHARE |



Foto: Nasabah Jiwasraya yang tergabung dalam Forum Korban Jiwasraya melakukan aksi damai di Kantor Pusat Jiwasraya, Jakarta, Jumat, (11/9). (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengamat asuransi Irvan Rahardjo menilai adanya protes dan gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap PT Asuransi Jiwasraya (Persero) bisa mengganggu jalannya proses restrukturisasi nasabah yang tengah diproses.

"PKPU apabila dikabulkan menimbulkan tekanan besar bagi upaya restrukturisasi yang sudah dicanangkan Jiwasraya, dalam hal ini IFG yang belum sepenuhnya disetujui nasabah," kata Irvan saat dihubungi CNBC Indonesia, Selasa (19/1/2021).

Padahal, menurut Irvan, skema restrukturisasi saat ini menjadi yang opsi terbaik ketimbang likuidasi. Namun, dengan catatan, restrukturisasi dilakukan secara tunai bukan melalui cicilan.

"Karena sudah ada PMN [penyerahan modal negara] Rp 22 triliun, yang dibutuhkan oleh nasabah pembayaran tunai bukan dicicil apalagi tanpa bunga bahkan dipotong (*haircut*), itu sangat tidak proporsional," kata Irvan melanjutkan.

Terkait dengan PKPU ini, Deputi Komisiner Humas dan Logistik Anto Prabowo menyampaikan, OJK sepenuhnya menghormati proses hukum yang sedang dihadapi Jiwasraya.

"Kita hormati pengadilan. PKPU juga mendapat perhatian dari ketentuan yang diatur secara khusus untuk PKPU Perasuransian," kata Anto dalam media briefing, akhir pekan lalu.

Seperti diketahui, Jiwasraya digugat PKPU oleh Masrura Muchtar dan Mokhtar Noer Jaya yang didaftarkan pada Senin (11/1/2021) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara nomor perkara 34/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst. Majelis hakim telah menetapkan panitera pengganti serta penunjukan jurusita pada Rabu (13/1/2021).

Selain itu, nasabah yang tergabung dalam Forum Korban BUMN Jiwasraya membuat pernyataan sikap di satu halaman surat kabar nasional.

Dalam pernyataan sikap disebutkan, nasabah menolak skema restrukturisasi polis yang ditawarkan Jiwasraya via 7 bank penjual karena dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan nasabah.

Penawaran yang ditolak dalam bentuk cicilan 15 tahun tanpa bunga dan cicilan 5 tahun tanpa bunga dengan pemotongan pokok 29%-31%.

"Kami menggugat pihak Asuransi Jiwasraya untuk segera merealisasikan pembayaran hak-hak yang telah jatuh tempo sebagaimana telah dinyatakan dan tertuang dalam kontrak polis yang sebelumnya telah disetujui bersama nasabah Saving Plan," tulis pernyataan tersebut, yang dipublikasikan Selasa (19/1/2021).

Ada 8 poin utama isi pernyataan tersebut. Nasabah juga menolak pemindahan pengelolaan polis ke Asuransi Jiwa IFG Life yang merupakan anak usaha IFG (Indonesia Financial Group, nama baru BUMN PT Bahana). Nasabah juga menggugat pemegang saham Jiwasraya melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Direktur Utama Jiwasraya Hexana Tri Sasongko merespons penolakan nasabah tersebut. Skema yang ditawarkan manajemen Jiwasraya merupakan solusi yang terbaik yang bisa diberikan.

"Solusi yang kami sampaikan adalah yang terbaik yang saat ini bisa kita peroleh. Pemerintah sudah hadir sebagai pemegang saham sesuai dengan kemampuan di tengah kondisi saat ini. Ini jauh lebih baik dari opsi solusi likuidasi," kata Hexana kepada CNBC Indonesia.

"Saat ini kami fokus sosialisasi dan sekaligus restrukturisasi nasabah lain. Sudah banyak yang close. Kami mohon maaf kalau kalau tidak memuaskan."

8. **102.856 Nasabah setuju restrukturisasi polis Jiwasraya**
kontan.co.id / 19-01-2021

102.856 Nasabah setuju restrukturisasi polis Jiwasraya

Selasa, 19 Januari 2021 / 18:07 WIB



ILUSTRASI. Gedung kantor pusat Asuransi Jiwasraya, Jakarta. KONTAN/Fransiskus Simbolon

Reporter: **Ferrika Sari** | Editor: **Herlina Kartika Dewi**

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Restrukturisasi polis Jiwasraya terus berlangsung. Hingga 18 Januari 2020, sebanyak 102.856 pemegang polis menyetujui program restrukturisasi tersebut.

Koordinator Tim Satgas Restrukturisasi Polis Jiwasraya bidang Komunikasi dan Hukum R. Mahelan Prabantarikso mengatakan, sebanyak 101.294 peserta berasal dari 884 perusahaan. Sedangkan 1.156 peserta adalah pemegang polis ritel, dan 406 peserta pemegang polis bancassurance.

"Terdapat kenaikan jumlah peserta yang sangat signifikan dalam dua pekan pasca kami mengumumkan tahapan sosialisasi di akhir Desember 2020 dan mulai mengirimkan surat penawaran program restrukturisasi pada awal Januari 2021," kata Mahelan dalam keterangan resmi, Selasa (19/1).

Ia menyebut, kenaikan jumlah peserta yang mengikuti program restrukturisasi tak lepas dari peran pemerintah, regulator, internal hingga agen Jiwasraya. Mereka dinilai telah menyiapkan segala perangkat teknis serta non teknis mengenai pelaksanaan program restrukturisasi tersebut.

Demi mempercepat restrukturisasi, Jiwasraya telah menyiapkan 1.094 agen dan ratusan pegawai yang tersebar di kantor pusat dan wilayah untuk melakukan sosialisasi program tersebut.

Anggota Tim Percepatan Restrukturisasi Polis Jiwasraya Fabiola Sondakh mengatakan optimistis program ini bisa diikuti seluruh nasabah.

"Semoga kerja keras ini dapat dipahami sebagai tanggungjawab dan komitmen kami sebagai manajemen baru dalam rangka menyelamatkan seluruh polis Jiwasraya. Upaya ini adalah upaya terbaik yang saat ini dapat kami berikan kepada seluruh pemegang polis," kata Fabiola yang juga menjabat sebagai Direktur Pemasaran Ritel Jiwasraya.

Dalam rangka menyelamatkan seluruh polis Jiwasraya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menyiapkan dana mencapai Rp 22 triliun yang berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk mendirikan perusahaan asuransi baru bernama IFG Life.

Selain itu, terdapat tambahan modal senilai Rp 4,7 triliun yang berasal setoran dividen IFG yang nantinya akan diberikan kepada IFG Life.

Rencananya, dana tersebut digunakan untuk membayar manfaat polis yang direstrukturisasi sekaligus modal IFG Life dalam menyasar bisnis di sektor asuransi kesehatan, jiwa dan pengelolaan dana pensiun.

Melalui pendanaan tersebut, IFG Life sendiri diharapkan akan menjadi perusahaan asuransi terbesar lantaran memiliki target pemegang polis yang berasal dari ekosistem BUMN dan masyarakat umum.

9. Per 18 Januari, 102.855 Nasabah Ikut Program Restrukturisasi Polis Jiwasraya
merdeka.com / 19-01-2021

Per 18 Januari, 102.855 Nasabah Ikut Program Restrukturisasi Polis Jiwasraya

Selasa, 19 Januari 2021 16:18
Reporter : Idris Rusadi Putra



Ilustrasi Jiwasraya. ©2020 Liputan6.com

Merdeka.com - Tim Percepatan Restrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mencatat bahwa hingga 18 Januari 2021 jumlah pemegang polis yang mengikuti program restrukturisasi polis Jiwasraya mencapai 102.856 peserta.

Program restrukturisasi terdiri atas 101.294 peserta yang berasal dari 884 perusahaan untuk pemegang polis kategori korporasi, 1.156 peserta dari pemegang polis kategori ritel, dan 406 peserta dari pemegang polis kategori bancassurance.

"Jumlah peserta program restrukturisasi meningkat signifikan dalam dua pekan setelah pengumuman tahapan sosialisasi di akhir Desember 2020 dan pengiriman surat penawaran program restrukturisasi awal Januari 2021. Capaian ini menambah motivasi dan semangat kami untuk menyelamatkan seluruh polis Jiwasraya," kata Koordinator Tim Satgas Restrukturisasi Polis Jiwasraya bidang Komunikasi dan Hukum R. Mahelan Prabantarikso dikutip dari Antara, Selasa (19/1).

Mahelan menjelaskan, kenaikan jumlah peserta program restrukturisasi tak lepas dari peran sejumlah pihak mulai dari pemerintah, regulator, otoritas hingga internal, dan agen Jiwasraya yang telah menyiapkan segala perangkat teknis serta nonteknis mengenai pelaksanaan program restrukturisasi polis Jiwasraya.

"Terima kasih atas pengertian para pemegang polis Jiwasraya yang berkenan ikut program penyelamatan polis. Para pemegang polis menjadi salah satu faktor utama dari upaya penyelamatan polis ini," kata Mahelan yang juga Direktur Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Jiwasraya.

Sementara itu anggota Tim Percepatan Restrukturisasi Polis Jiwasraya Fabiola Sondakh telah menyiapkan sedikitnya 1.094 agen dan ratusan pegawai yang tersebar di kantor pusat dan wilayah untuk melakukan sosialisasi program restrukturisasi. Fabiola pun optimistis program restrukturisasi ini akan diikuti oleh seluruh pemegang polis.

"Semoga kerja keras ini dapat dipahami sebagai tanggungjawab dan komitmen kami sebagai manajemen baru dalam rangka menyelamatkan seluruh polis Jiwasraya. Upaya ini adalah upaya terbaik yang saat ini dapat kami berikan kepada seluruh pemegang polis," kata Fabiola yang juga Direktur Pemasaran Ritel Jiwasraya.